

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Umum Sikap Peserta Didik

a. Pengertian Sikap Peserta Didik

Sikap dinyatakan dengan istilah “*attitude*” yang berasal dari kata latin “*aptus*” yang berarti keadaan sikap secara mental yang bersifat subjektif untuk melakukan kegiatan. Sikap seseorang terbentuk karena ada objek tertentu yang memberikan rangsang pada dirinya. Sikap adalah bagian yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Sikap dapat bersifat positif dan negatif. Sikap positif memunculkan kecenderungan untuk menyenangkan, mendekati, menerima, atau bahkan mengharapkan kehadiran objek tertentu. Sedangkan sikap negatif memunculkan kecenderungan untuk menjahui, membenci, menghindari, menghindari ataupun tidak menyukai keberadaan suatu objek. Menurut Sunaryo (2004: 200) Sikap terdiri dari berbagai tingkatan yakni:

1. Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (*subjek*) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (*objek*)

2. Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut.

3. Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga, misalnya seseorang mengajak ibu yang lain (tetangga, saudaranya, dan sebagainya) untuk menimbang anaknya ke posyandu atau mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak.

4. Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

Sikap merupakan konsep paling penting dalam psikologi sosial. Pembahasan berkaitan dengan psikologi (*social*) hampir selalu menyertakan unsur sikap baik sikap individu maupun sikap kelompok sebagai salah satu bagian dari pembahasannya. sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan tingkah laku. Dalam pergaulan sehari-hari sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Seperti halnya teori sikap yang dikemukakan oleh Mar'at (1984: 10) Ia mengemukakan bahwa "sikap diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas".

Pengertian sikap dikemukakan oleh Aiken dalam Ramdhani (2009: 11), mendefinisikan "sikap sebagai predisposisi atau kecenderungan yang dipelajari dari seorang individu untuk merespon secara positif atau negatif dengan intensitas yang moderat atau memadai terhadap objek, situasi,

konsep atau orang lain”. Sementara itu, Chalpin dalam Ali dan Asrori (2008: 141) “menyamakan sikap sama dengan pendirian. Lebih lanjut dia mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap orang lain, objek, lembaga atau persoalan tertentu”. Sedangkan Thurston dalam Bimo Wagito (2003: 109) “menyatakan sikap adalah suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif ialah afeksi senang, sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang tidak menyenangkan”. Kemudian menurut Gerung dalam Sunarto dan Agung Hartono (2002: 170) “sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal”.

Pendapat lain mengenai sikap dikemukakan oleh Sunarto (2006: 170) yaitu:

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu, sebagai suatu penghayatan terhadap objek di lingkungan tertentu. Sikap merupakan salah satu aspek psikologis individu yang sangat penting karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Sikap setiap orang berbeda atau bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya sehingga perilaku individu menjadi bervariasi. Pentingnya aspek sikap dalam kehidupan individu, mendorong para psikologis untuk mengembangkan teknik dan instrument untuk mengukur sikap manusia. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan menilai pernyataan sikap seseorang. Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat yang mengatakan suatu mengenai objek sikap yang hendak diungkap.

Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari dalam

kehidupan. Menurut Sunaryo (2004: 200) Sikap terdiri dari berbagai tingkatan yakni: menerima, merespon, menghargai dan bertanggungjawab.

Berdasarkan definisi-definisi sikap yang telah dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak, berfikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai untuk menentukan apakah orang harus setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu menentukan apa yang disukai, diharapkan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sikap peserta didik yang positif terutama kepada guru dan mata pelajaran yang diterima merupakan tanda yang baik bagi proses belajar peserta didik. Sebaliknya, sikap negatif yang didirungi dengan kebencian terhadap guru dan mata pelajarannya menimbulkan kesulitan belajar peserta didik tersebut, sehingga prestasi belajar yang dicapai peserta didik akan kurang memuaskan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 4 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.

Menurut Sardiman (2007: 111) “siswa atau peserta didik adalah salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar”.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas mengenai peserta didik, bahwa peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang yang

menjalankan kegiatan pendidikan dan berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.

2. Tinjauan Umum Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

a. Konsep Pembelajaran

Pembelajaran yang berasal dari kata dasar belajar adalah proses dari perkembangan manusia, dengan belajar manusia melakukan perubahan-perubahan sehingga tingkah lakunya berubah..

Menurut Degeng dalam Uno (2009: 3) “pembelajaran sebagai suatu disiplin ilmu menaruh perhatian kepada perbaikan kualitas pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran deskriptif. Selanjutnya menurut Gagne, Briggs, dan Wager dalam Winataputra (2009: 19) mendefinisikan “pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa”. Selanjutnya menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyatakan pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian menurut Dimiyati dalam Mudjiono (2000: 297) “pembelajaran ialah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar”.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan maka pembelajaran ialah suatu kegiatan yang direncanakan dan dibuat oleh guru kepada

peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan-tujuan yang diinginkan dan yang diharapkan.

b. Teori Belajar

1. Teori belajar Behavioristik

Teori belajar ini pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negative. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. Dalam teori belajar ini guru tidak banyak memberikan ceramah ,tetapi instruksi singkat yang di ikuti contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi.

2. Teori belajar Kognitif

Menurut teori ini, proses belajar akan belajar dengan baik bila materi pelajaran yang beradaptasi (berkesinambungan) secara tepat dan serasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Dalam teori ini ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses pembelajaran ini bejalan tidak sepotong – sepotong atau terpisah – pisah melainkan bersambung sambung dan menyeluruh. Teori belajar kognitif ini guru bukanlah sumber belajar utama dan bukan kepatuhan

siswa yang dituntut dalam refleksi atas apa yang diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Evaluasi belajar bukan pada hasil tetapi pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasi pengalamannya.

3. Teori belajar Humanistik

Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para siswa sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri.

4. Teori belajar Konstruktivistik

Menurut teori ini permasalahan dimunculkan dari pancingan internal, permasalahan muncul dibangun dari pengetahuan yang direkonstruksi sendiri oleh siswa. Teori ini sangat dipercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan

dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu bangunan utuh.

5. Teori belajar Gestalt

Menurut pandangan teori gestalt seseorang memperoleh pengetahuan melalui sensasi atau informasi dengan melihat strukturnya secara menyeluruh kemudian menyusunnya kembali dalam struktur yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami.

Manfaat dari beberapa teori belajar adalah :

1. Membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar.
2. Membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran.
3. Memandu guru untuk mengelola kelas.
4. Membantu guru untuk mengevaluasi proses, perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai.
5. Membantu proses belajar lebih efektif, efisien dan produktif
6. Membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal.

c. **Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Noor MS Bakry dalam Sutoyo (2011: 6) “pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia”.

Sedangkan menurut Sofhiah dan Gatara (2001: 6) “Pendidikan Kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai proses dari pendewasaan bagi warga negara dengan usaha sadar dan terencana melalui pengajaran dan pelatihan sehingga terjadi perubahan pada warga negara tersebut dalam hal pengetahuan, sikap dan perilaku yang bersifat kritis dan emansipatoris”.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai “*citizenship education*” secara substantif didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Perjalanan mata pelajaran *civics* setelah Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan-perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Pada kurikulum 1957 istilah yang digunakan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian pada kurikulum 1961 berubah menjadi *civics* lagi, kemudian pada tahun 1968 menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selanjutnya kurikulum 1975 menjadi PMPKN. Pada kurikulum 1994 berubah lagi menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Dan pada

kurikulum 2006 berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sampai sekarang.

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional kurikulum 2004 Paradigma Baru Pkn berdasarkan standar isi BNSP (2003:2) Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri dan pribadi berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan menurut standar isi BNSP (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Dasar dan Menengah, 2006:33) adalah:

“mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian warganegara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif serta mempunyai karakter yang khas dalam sikap dan moral sebagai bangsa Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

d. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa

Meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

2. Norma hukum dan peraturan

Meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

3. Hak asasi manusia

Meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional Hak Asasi Manusia, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Kebutuhan warga Negara

Meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

5. Konstitusi negara

Meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.

6. Kekuasaan dan politik

Meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila

Meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi

Meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

d. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan

Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Adapun objek material dari pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warganegara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antara warganegara dan negara (termasuk hubungan antar warganegara) dan segi pembelaan negara. Dalam hal ini pembahasan pendidikan kewarganegaraan terarah pada warga negara Indonesia dan pada upaya pembelaan negara Indonesia.

e. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran merupakan proses belajar yang dialami peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik juga bisa didapatkan dari berbagai informasi seperti tulisan-tulisan, didapatkan dari gambar-gambar yang berkaitan dengan materi belajar, dan juga bisa didapatkan dari siaran televisi atau gambaran atas gabungan beberapa objek secara fisik dimana guru akan memberikan arahan atau aturan untuk memandu siswa tersebut.

Upaya utama yang dapat mencapai perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik antara lain ialah

melalui proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya baik yang direncanakan maupun spontan.

Mengusahakan terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif yang menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang tenang dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Namun pengaruh guru pada perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik amatlah besar karena berlangsung atau tidaknya proses pembelajaran (belajar-mengajar) secara benar, bergantung pada pribadi dan tingkat kecerdasan guru, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai penunjang belaka.

Demikian halnya dengan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses menyampaikan, menanamkan, mengembangkan, dan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada anak didik agar menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis.

Berdasarkan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan yang dituangkan dalam Standar Proses PKN (2006: 95), Proses pembelajaran PKN memuat uraian tentang :

1. Tujuan (*instructional objectives*) mata pelajaran yang dirumuskan berupa ramuan dari sumber bahan yang diangkat dari rasionel program.
2. Pengalaman belajar (*learning experiences*) yang direncanakan baik menyangkut bidang teori, praktikum maupun pengalaman di lapangan.

3. Topik dan Sub-topik yang akan disajikan, yang dianggap penting dan esensial sebagai bahan ajar (*instructional materials*) yang akan dijadikan pembekalan yang cocok untuk pelaksanaan spektrum tugas mendukung kompetensi yang diharapkan.
4. Cara dan Teknik penyajian (*course offering style*) yang dipilih dan serasi dengan sifat dan ciri bahan ajar.
5. Takaran waktu yang dianggap memadai untuk penyajian bahan ajar baik yang bersifat klasikal, laboratorer maupun kerja lapangan (*field work*) dan,
6. Bahan sumber yang cocok sebagai buku-dasar (*text book*), maupun referensi guna pengayaan (*enrichment*) melengkapi bahan ajar.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui:

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pasca KBK (Standar isi BSNP):

- a. *Civics Intellegence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial.
- b. *Civics Responsibility*, yaitu kecerdasan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan
- c. *Civics Participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Hakikat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya untuk mengartikan, menyalurkan, dan membina peran warga negara dari berbagai aspek kehidupan agar terbentuk sebagai warga negara yang baik yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. serta memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan

warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis. Maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat besar dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mentransformasikan, menanamkan, mengembangkan, serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

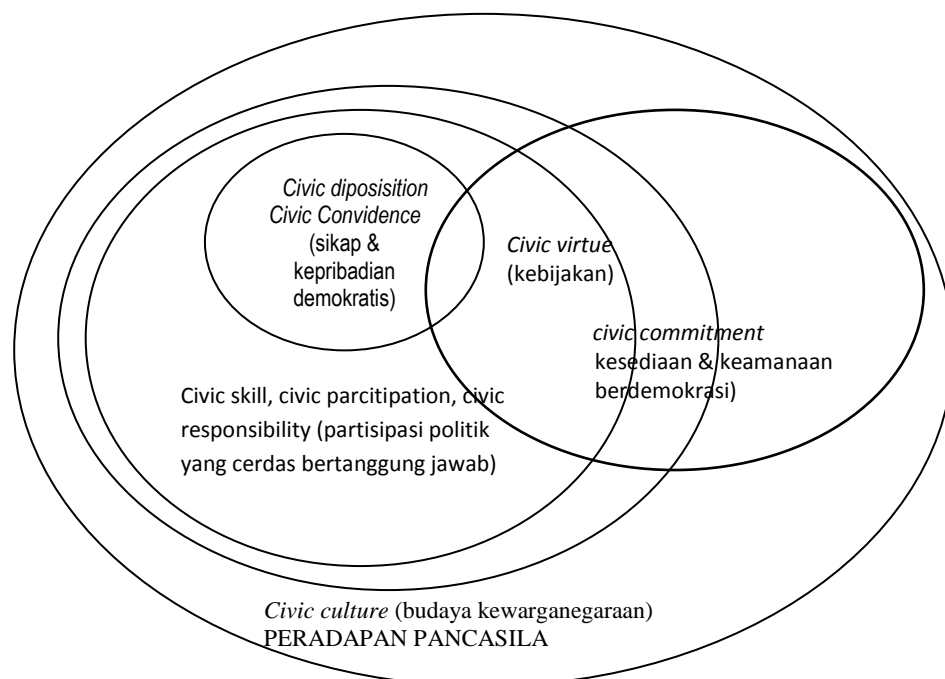
f. Rumpun Keilmuan

Pendidikan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan *Civic Education* yang dikenal di berbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, pendidikan kewarganegaraan bersifat antar disiplin (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu budaya.

g. Dimensi Sasaran Akhir Pkn

Paradigma baru Pkn menerapkan pola pikir baru dengan hasil belajar yang di miliki siswa, hal tersebut di jelaskan pada gambar berikut :

Sasaran akhir Pendidikan Kewarganegaraan.



Sumber : Udin, 2010

Diagram di atas menggambarkan bahwa mata pelajaran PKn terdiri dari 5 sasaran akhir antara lain sikap dan kepribadian demokratis (*civic disposition, civic convidence*). kebijakan (*civic virtue*). Kesediaan dan keamanan berdemokratis (*civic commitment*) dan yang terakhir adalah budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

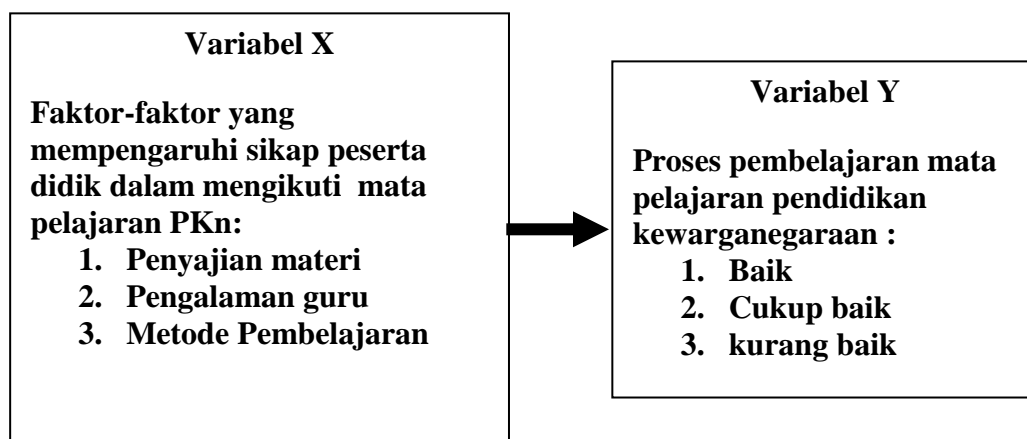
B. Kerangka Pikir

Sikap peserta didik di lingkungan sekolah sangat bervariasi tergantung kepribadian yang ada dalam diri siswa. Sikap peserta didik yang selalu menghormati guru di sekolah yang ditandai dengan sapaan yang ramah dan salaman dengan gurunya adalah salah satu contoh dari sikap peserta didik yang baik. Sikap peserta didik yang baik akan mendukung aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas yang sering ditandai

dengan keberagaman dari sikap peserta didik dapat berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran.

Berdasarkan penjabaran di atas, untuk lebih jelasnya maka penulis menyajikan kerangka pikir dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir